

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu realitas sosial masalah yang memiliki banyak dimensi. Ia tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek lainnya seperti politik, pendidikan, pemahaman keagamaan, kesehatan, dan sebagainya. Melalui berbagai pendekatan ilmiah problem kemiskinan tersebut diurai dan dicari akar masalahnya untuk kemudian dirumuskan solusinya. Sebagai suatu realitas sosial, kemiskinan merupakan pokok bahasan yang umum dikaji baik dengan menggunakan pendekatan ilmu agama, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, maupun politik. Meskipun demikian ~~namun~~ persoalan kemiskinan tidak pernah selesai sebab memiliki banyak variabel di setiap kasusnya. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di masyarakat.

Kemiskinan dan kemakmuran sering ~~Øberdampingan~~ di suatu wilayah, bahkan di dalam suatu negara yang makmur (kaya) sekalipun. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan secara konsisten telah melakukan pembangunan nasional mulai zaman Orde Baru dan dilanjutkan dengan Orde Reformasi tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data yang dikutip Suryawati jumlah penduduk miskin di tahun 1970 berjumlah 70 juta jiwa (60%) turun menjadi 22 juta jiwa (11%) pada tahun 1997, tetapi meningkat pesat menjadi 80 juta jiwa (naik sekitar 400%) pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia.<sup>1</sup>

Hasil survei Sam Mountford, yang dirilis 17 Januari 2012, menempatkan kemiskinan sebagai masalah krusial dibanding masalah lainnya. Kemiskinan selalu menjadi penyakit yang mengancam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>2</sup> Tahun 2020 Indonesia terdampak pandemi Covid-19 yang memorak-

---

<sup>1</sup> Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *JMPK Vol. 08 No.03*, September 2005, hlm. 123.

<sup>2</sup> Menurut BPS, selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017

porandakan sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Kompleksitas dari permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri, melainkan implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan, seperti kesehatan, sarana prasarana pendidikan, korupsi yang semakin merajalela, pengangguran dan PHK, sehingga menjadi ketakutan setiap orang, di mana dampak besar berikutnya adalah terabaikannya kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Persoalan kemiskinan dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek pemukiman, pendidikan yang baik, serta kesehatan yang layak. Hasil analisis terhadap peta kemiskinan di Indonesia, dapat dirujuk pada dua hal, yaitu kemiskinan di perdesaan dan kemiskinan di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan memiliki corak tersendiri. Terdapat desa yang masuk pada kategori miskin, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat perdesaan tidaklah setinggi di perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan di perkotaan yang lebih tinggi telah menyebabkan tingkat ketimpangannya menjadi lebih tinggi, sebab pertumbuhan penduduk di perkotaan juga lebih cepat. Sementara itu, tingkat pertumbuhan penduduk di perdesaan lebih lamban.<sup>5</sup>

Kemiskinan memiliki persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para pemikir maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari berbagai multidisiplin keilmuan terus dikembangkan para pemikir maupun praktisi untuk mengkaji masalah kemiskinan. Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan

---

menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Sumber: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses tanggal 10 Januari 2021, pukul 21:30.

<sup>3</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>, diakses tanggal 10 Januari 2021, pukul 21:35.

<sup>4</sup> Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam", *Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 1 April 2017, hlm. 68.

<sup>5</sup> Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 447.

persoalan-persoalan non ekonomi, seperti masalah sosial, budaya, dan politik sehingga persoalan kemiskinan bukan berurusan semata-mata dengan masalah kesejahteraan sosial (*social well-being*) saja.<sup>6</sup>

Sebagaimana diungkapkan Chambers, dalam Nasikun, bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) terasing (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya berupa hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>7</sup>

Selain terkait dengan faktor-faktor sosial budaya, sebagaimana disebutkan di atas, kemiskinan juga sering berkaitan dengan masalah pemahaman pemeluk agama. Pertanyaan tentang bagaimana pemahaman keagamaan terkait dengan kemiskinan telah menghidupkan berbagai kegiatan penelitian. Misalnya, filsafat memiliki perhatian tersendiri pada kemiskinan sebagaimana yang dilakukan Karl Marx dengan mengkritisi kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kepercayaan atau agama mengalihkan pekerja yang teralienasi dari penderitaan mereka; dengan frasa terkenal dari Marx, “agama adalah candu masyarakat”<sup>8</sup> semasa hidupnya Marx, mengkritisi ekonomi politik kapitalis, yang dibangun di atas landasan filosofi, menghasilkan disertasi doktoralnya yang berjudul “*Differences between the Natural Philosophies of Democritus and Epicurus*”. Penelitian berdasarkan fondasi filosofis ini membawa Marx kepada penelitian ekonomi yang lebih matang, sehingga melahirkan karya besarnya, *Das Kapital*. Interpretasi humanis Marx terhadap alienasi manusia dan penyatuan keterasingan manusia ke dalam

---

<sup>6</sup> Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan...*, hlm. 69.

<sup>7</sup> Owin Jarnasy, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Belantika, 2004), hlm. 56.

<sup>8</sup> Hoverd, W. J., Bulbulia, J., & Sibley, C. G, “Does poverty predict religion?” *Religion, Brain & Behavior*, Vol. 3 No. 3, 2013, hlm. 186.

keyakinan dan praktik-praktik keagamaan. Marx mengatakan bahwa “keterasingan manusia dalam riuh barang-barang komoditas sebagai analogi bagi keterasingan manusia dalam hubungan supranatural”.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Marx mendefinisikan manusia sebagai *homo faber* yang dipengaruhi oleh Giambattista Vico (1744) sebab manusia mengembangkan dirinya sendiri melalui kerja. Sisi pemikiran tersebut dapat dilihat dalam kutipan dari *Capital* yang menerangkan persoalan kerja, teknologi alam dan agama sekaligus:

Seperti yang dikatakan oleh Vico, sejarah manusia berbeda dari sejarah alam, karena kita sebagai manusialah yang membuat yang pertama, sedangkan alam tidak mampu membuat yang kedua. Teknologi telah membuka kode-kode manusia yang berkaitan dengan alam, proses produksi yang digunakannya untuk mempertahankan hidup, yang telah menentukan bentuk formasi relasi sosial dan konsepsi mental yang mereka pergunakan. Setiap agama yang gagal menjelaskan dasar material ini bisa menjelaskan dasar material ini bisa dikatakan tidak kritis sama sekali. Pada dasarnya dengan menganalisis, sangatlah mudah menemukan titik pusat yang terpancang di bumi yang telah menciptakan agama, ketimbang mengait-ngaitkan relasi-relasi kehidupan yang dirasa cocok dengan bentuk-bentuk relasi yang mengapung disurga. Metode yang dipakai pada usaha yang terakhir adalah materialistis, dan oleh sebab itu paling ilmiah.<sup>10</sup>

Marx dalam analisis materialistisnya, membaca agama dari sisi masyarakat modern melalui analisis ekonomi yang sangat ketat. Marx berpendapat bahwa *starting point* dari kualitas manusia yang dianalisisnya diawali dengan fakta bahwa ketika masyarakat modern terbentuk, masyarakat pekerja semakin miskin dengan semakin banyaknya barang yang ia produksi dan semakin tinggi kekuatan dan jangkauan produksinya. Semakin banyak komoditas yang ia hasilkan pekerja menjadi komoditas lebih murah. Seiring dengan eksploitasi (*verwetung*) terhadap dunia objektif terjadilah depresiasi dunia manusia.<sup>11</sup> Agama pada akhirnya tak lebih dari pelarian manusia ketika hidupnya mengalami depresi.

---

<sup>9</sup> Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Munzir (Yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm. 128.

<sup>10</sup> Karl Marx, *Capital*. Vol. 1, diterjemahkan oleh Samuel Moore and Edward Aveling (Moscow: Foreign Language, 1961), hlm. 352.

<sup>11</sup> Herbert Marcuse, *Eros dan Peradaban: Sebuah Telaah Filosofis Tentang Freud*, diterjemahkan oleh Nur Cholish (Yogyakarta: Tanda Baca, 2018), hlm. 229.

Proudhon dalam *Philosophy of Poverty* (1846), menunjukkan bahwa di bawah sistem kapitalis saat ini, sumber kemiskinan adalah pembagian kerja yang berdampak pada upah. Setiap gerakan untuk menaikkan upah, tidak akan memiliki hasil selain mengembang harga bahan makanan dan barang-barang lainnya sehingga memperparah kemiskinan. Proudhon percaya, penurunan upah menyebabkan kemiskinan, tetapi menggunakan pemogokan sebagai sarana untuk menaikkan upah, tidak berbeda dengan “memberikan kelebihan produk dari produsen ke masing-masing produsen individu, yang bertentangan”. Pada akhirnya, “(hal itu) tidak dapat menghindari dari inflasi nilai universal, yang semakin memperburuk kemiskinan”.<sup>12</sup>

Marx secara khusus mengecam ‘formula’ Proudhon yang sangat kontradiktif dan tidak jelas baik sebagai ekonomi politik maupun sebagai kesimpulan filosofis. Dalam pemikirannya, Marx melihat asal usul timbulnya kemiskinan dan sebab-sebab kemiskinan, yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau kapitalis terhadap kaum pekerja atau proletar. Pola eksploitasi itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain menurut apa yang disebutnya ‘moda produksi’ (*mode of production*).

Menurut Marx, agama sama sekali adalah sebuah ilusi. Rasa takut adalah ilusi dengan konsekuensi yang sangat menyakitkan. Agama adalah bentuk ideologi yang paling ekstrem dan paling nyata—sebuah sistem kepercayaan yang tujuan utamanya adalah dapat memberikan alasan dan hukum-hukum agar seluruh tatanan dalam masyarakat bisa berjalan sesuai dengan keinginan penguasa. Pada kenyataannya, agama sangat bergantung pada kondisi ekonomi, sebab tidak ada satu pun doktrin dan kepercayaan-kepercayaan agama yang mempunyai nilai-nilai independen.<sup>13</sup> Lebih jauh Marx menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan atau dewa-dewa adalah lambang kekecewaan atas kekalahan dalam perjuangan kelas. Marx berhujah bahwa agama itu mengekspresikan penderitaan manusia

---

<sup>12</sup> Pierre Joseph Proudhon, *What is a Property? An Inquiry into the Principle of Right and of Government*, diterjemahkan oleh Benjamin Tucker (London: Humblod Publishing Company, 2003), hlm. 234.

<sup>13</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Munzir dan M, Syukri (Yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm. 201.

yang disebabkan oleh perubahan ekonomi atau pemisahan kehidupan manusia yang egoistis dalam masyarakat sipil dari kehidupannya sebagai makhluk manusia dalam masyarakat politik.<sup>14</sup>

Berbeda dengan Marx yang memandang agama dengan tatapan yang sinis, Durkheim percaya bahwa kehadiran religi dalam masyarakat tidak dapat dielakkan atau merupakan suatu kemestian.<sup>15</sup> Ia merupakan spekulasi metafisik tentang susunan dan sifat-sifat alami, namun dipadukan dengan bentuk-bentuk tingkah laku ritual dan disiplin moral. Karakter ini merupakan sumber sikap altruistis yang mempunyai dampak mengendalikan egoisme, mendorong manusia untuk berkorban tanpa pamrih, dengan demikian pula ia mengikatkan diri dengan sesuatu yang berada di luar dirinya yang penuh melambangkan cita-cita. Mengenai sumbangan agama kepada pemeluknya, Durkheim menyatakan “*in reality, then there are no religions which false. All are true in there own fashion; all answer, though in different ways, to give condition of human existence*”.<sup>16</sup>

Pendapat Durkheim dipengaruhi antara lain oleh Wundt yang berhasil menunjukkan fungsi agama sebagai sumber kohesi kelompok. Tesis ini menemukan justifikasi dalam studi Keppel (1997) tentang sumbangan agama dalam pembebasan negara-negara dunia ketiga dari kolonialisme. Durkheim kembali menunjukkan sikap positif terhadap agama terutama sumbangan agama terhadap perkembangan dan konservasi moralitas masyarakat:

Saya akan mengajukan pendapat saya mengenai kesulitan apa yang akan kita jumpai. Pertama-tama, karena eratnya hubungan antara moralitas dan agama yang terbentuk selama perjalanan sejarah; kita mulai membuang segala sesuatu yang berbau agama dari sistem tradisional tanpa menyediakan penggantinya, dan dengan demikian kita telah akan menghadapi bahaya ikut terbuangnya gagasan-gagasan dan perasaan moral yang hakiki. Ini karena unsur moralitas yang utama tidak akan pernah terungkap kecuali dalam kedok sebagai unsur agama. Kedua, moralitas rasional tidak mungkin mempunyai isi yang sama dengan moralitas yang tergantung dari suatu otoritas yang lain dari akal budi. Sebab

---

<sup>14</sup> Karl Marx, *Early Writing*, diterjemahkan oleh Gregor Benton and Rodney Livingston (New York: Random House, 1975), hlm. 378.

<sup>15</sup> Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama*, diterjemahkan oleh Sonia Salim (Yogyakarta: Forum, 2014), hlm. 65.

<sup>16</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religijs Life*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Munzir (Yogyakarta: Ircisod, 2011), hlm. 56.

perkembangan rasionalisme tidak mungkin berjalan tanpa perkembangan individualisme dan dengan demikian tidak mungkin tanpa pemurnian kepekaan moral.<sup>17</sup>

Di berbagai negara baik di negara yang sudah maju atau masih berkembang, kemiskinan bukanlah suatu hal yang aneh/ Akan tetapi, kemiskinan merajalela di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana hasil riset yang dikembangkan oleh Azmi Hasan dari Universiti Teknologi Malaysia, menyimpulkan bahwa sekitar 60-70 persen dari 56 negara Muslim di dunia masuk pada kategori miskin, penyebabnya yaitu masalah konflik, perang, tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi, dan kurangnya integritas.<sup>18</sup> Hal tersebut sesungguhnya sangat disayangkan, padahal Islam benar-benar memerangi kemiskinan, dan mendorong setiap muslim untuk menjadi kaya<sup>19</sup> dan tidak bergantung pada orang lain.

Kaitannya kemiskinan dengan agama, dalam hal ini agama Islam, memiliki sejarah panjang keberpihakan terhadap kaum miskin dan tertindas, sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat sebagai dasar ajaran sosial Islam, salah satunya dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan. Jika salat membentuk kesalehan pribadi, maka zakat membentuk kesalehan secara sosial, karena kesalehan muslim secara pribadi harus seimbang dengan kesalehan sosial. Dengan demikian, Islam tidak memisahkan antara dimensi salat dan dimensi zakat, di mana keduanya bersentuhan langsung dengan realitas sosial. Wajah yang menghadap ke dunia batin adalah kesadaran mitis yang berdimensi personal dan subyektif, wajah yang menghadap ke dunia luar atau

---

<sup>17</sup> Durkheim, *The Elementary Forms...*, hlm. 198.

<sup>18</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q30ivb366/mayoritas-negara-muslim-miskin>, di unggah 22 Maret 2021, pukul 13:51 WIB.

<sup>19</sup> Dalam pandangan Islam, kekayaan dan peningkatannya adalah tujuan penting, tetapi bukan tujuan, tetapi hanya tujuan perantara. Kekayaan bukanlah tujuan utama atau tujuan utama manusia di muka bumi, tetapi sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia berkewajiban untuk memanfaatkan kekayaan tersebut untuk pengembangan segenap potensi manusia dan untuk meningkatkan kemanusiaan manusia dalam segala hal. bidang, baik moral maupun materi. Jadi, menambah kekayaan demi terwujudnya tujuan utama umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, adalah sarana terbaik untuk akhirat. Tidak ada yang baik untuk seseorang yang tidak memperjuangkannya. Dalam hal ini, mereka yang mengabaikan dan meninggalkan dunia tidak termasuk dalam naungan Islam. Lihat, Muhammad Baqir As-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Az-Zahra, 2008), hlm. 426.

dunia lahir adalah kesadaran moral atau etis yang berdimensi sosial dan obyektif.<sup>20</sup> Bahkan, manifestasi zakat adalah kegotongroyongan dan kedermawanan antara para hartawan dengan para fakir miskin sebagai bagian dari manifestasi keimanan, “*Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka*” (QS. At-Taubah, 9:103).

Contoh pembelaan agama pada pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa agama dan keyakinan ada pada garda terdepan perubahan sosial dan perbaikan derajat kehidupan umatnya. tidak berlebihan menempatkan nilai-nilai iman yang emansipatif menjadi obor penerang ritual sosial yang membangkitkan bangsa. Pada batasnya, tugas mulia hadirnya agama untuk membangkitkan umat dari *ketertinggalan*. Dalam Islam, *ketertinggalan* berarti kemiskinan yang dianggap sebagai persoalan serius sekaligus berbahaya, karena kemiskinan terkadang mengakibatkan tingkat keimanan menjadi terganggu dan justru dikhawatirkan hilang atau dengan kata lain menjadi kafir.<sup>21</sup> Kemiskinan merupakan masalah yang mengancam akidah sehingga harus segera diatasi, dengan mengentaskan penyebabnya. Karena itu, setiap umat Islam wajib mengatasi kemiskinan salah satunya dengan disiplin membayar zakat.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan dan ketertinggalan merupakan tantangan yang harus diatasi dengan partisipasi dan keberpihakan agama, karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Meskipun umat beragama di Indonesia memiliki tingkat kesadaran keberagamaannya yang cukup tinggi, beberapa dari mereka hidup dalam kondisi kehidupan ekonomi yang miskin. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas Katolik, atau Yogyakarta yang mayoritas penduduknya muslim, serta masih banyak lagi daerah-daerah lain

---

<sup>20</sup> Masdar F. Mas’udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 23.

<sup>21</sup> Dalam hadis Nabi SAW. riwayat Anas dinyatakan bahwa kefaikran menuju kekufuran. Lihat Abu al-U’la Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarakfuriy, *Tuhafah al-Ahwadziy (Syarah Jami’ al-Turmudzi*, Juz kesepuluh (Bairut Lebanon: Dar al-Fikri, 1424 H/2003 M), hlm. 50.

<sup>22</sup> Nur Ahmad, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 92.



di Indonesia seperti Maluku, Kalimantan, Papua, di mana institusi agama aktif menjalankan misi kenabiannya, masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.<sup>23</sup>

Kemiskinan selalu diidentikkan dengan taraf hidup yang rendah, di mana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan persoalan amat mendasar yang harus ditangani. Penduduk miskin adalah mereka yang tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan yang berbasis pada agama akan menegaskan kewajiban kepada pemeluknya untuk menolong dan memperhatikan nasib sesamanya, dan memberikan sebagian harta untuk membantu orang lain yang kekurangan, baik kekayaan, keilmuan, ataupun kekuasaan. Al-Qur'an surat al-Ma'un: 1-3 menegaskan bahwa para pendusta agama adalah mereka yang menelantarkan anak-anak yatim dan tidak memberikan makan orang miskin. Dalam pandangan agama, kekayaan adalah baik. Islam menegaskan bahwa anugerah (kekayaan) adalah janji Tuhan, sedangkan kemiskinan (kefakiran) adalah janji setan (QS. 2:268).

Kekayaan adalah kebaikan yang harus diperoleh dengan cara baik. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik mencerminkan suatu kemiskinan rohani yang biasanya mendorong pemilik harta untuk tujuan yang berlawanan dengan moralitas. Oleh karena itu, kekayaan materi sepatutnya menjadi cerminan dari kekayaan rohani, atau paling tidak kekayaan materi seharusnya menjadikan rohaninya menjadi kaya, sehingga harta kekayaan memiliki makna sosial. Oleh karena kekayaan adalah kebaikan, maka para

---

<sup>23</sup> Widianarko, *Mengurai Belitan Krisis* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 46.

<sup>24</sup> Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. "Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna" *Jurnal Ekonomi (JE)*, Vol. 1, No. 1, 2016. hlm. 110.

pemeluk agama juga dianjurkan untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh moral agama, di mana cara dan tujuan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, agama selalu merespons kemiskinan dengan berbagai cara di masyarakat. Agama tidak hanya berfungsi dalam kapasitas etis dan ideologis ketika merespons kemiskinan. Agama memotivasi orang untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Keseimbangan dipulihkan ketika kemiskinan tidak hanya diukur dalam hal langkah-langkah etis dan spiritual, tetapi juga dalam upaya untuk menyediakan kebutuhan material orang miskin.

Dalam Islam, selain kewajiban menjalankan lima rukun Islam (syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji) bagi pemeluknya, seorang muslim juga diperintahkan untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sesamanya. Zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam sebenarnya dimaksudkan untuk membangun kepekaan sosial seorang Muslim atas Muslim yang lainnya.<sup>26</sup> Namun jika zakat bersifat wajib, Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan dengan maksud serupa, namun bersifat sunnah (*voluntary*), yakni berupa kurban, infak/sedekah, hibah dan wakaf. Lima hal tersebut, yang kemudian dikonsepsikan oleh para akademisi sebagai kedermwanaan Islam (filantropi Islam).<sup>27</sup>

Praktik filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. Zakat, infak, shadaqah, dan wakaf merupakan bentuk praktik filantropi Islam yang paling populer dan masuk dan berkembang di

---

<sup>25</sup> Musa Asy'arie, "Ekonomi dan Kemiskinan Tinjauan Agama", *UNISIA*, NO. 21, Th. XVI, Triwulan I, 1994, hlm. 38.

<sup>26</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diamalkan oleh seorang Muslim. Salat disebut sebanyak 95 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan zakat, infak, dan shadaqah masing-masing sebanyak 32, 76, dan 14 kali. Al-Qur'an selalu menyertakan perintah berzakat bersamaan dengan perintah menegakkan salat. Kewajiban salat dan zakat, baik dalam bentuk perintah maupun dalam kalimat afirmatif, pada 26 ayat disebutkan dalam satu kata yang berkesinambungan "*wa aqimussshalaata wa atuzzakaata*" (artinya: dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat) atau perintah berinfaq (membelanjakan harta dengan cara yang baik) dan bershadaqah (melaksanakan kebajikan) sebagai ekspresi keimanan dan rasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rizki. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, "Filosofi dibalik Perintah Berderma", dalam <http://lazismusurabaya.blogspot.com/2013/01/filosofi-dibalik-perintah-berderma.html>, diakses 12 Februari 2021, pukul 09:23.

<sup>27</sup> Ghifari Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), hlm. 2.

Nusantara, sejak abad ke tujuh praktik filantropi Islam di semenanjung Arab telah terdokumentasikan dengan baik melalui hadis-hadis Nabi, buku, arsip, dan monumen serta peninggalan sejarah lainnya. Sedangkan di Nusantara, bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Islam pada masa awal sangat minim—termasuk dengan praktik filantropi Islam.<sup>28</sup>

Sejauh ini filantropi telah banyak menjadi studi, kajian, penelitian dan mewarnai partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Menurut Hilman Latief, seperti dikutip Wulansari et al., bahwa studi filantropi Islam mulai berkembang di kampus-kampus, jurusan-jurusan yang memiliki fokus kajian filantropi mulai didirikan di Indonesia. Lembaga riset independen dan bahkan pemerintah sudah mulai melirik filantropi Islam sebagai salah satu kegiatan yang bisa diproyeksikan untuk mendukung kerja-kerja pembangunan. Tak heran, ruang-ruang untuk mengeksplorasi filantropi Islam juga semakin luas, seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial, politik, budaya dan teknologi di Indonesia.<sup>29</sup> Meskipun Pada masa-masa awal kemunculannya, penggunaan kata ‘filantropi’ mendapat penolakan dari sejumlah ulama Indonesia karena berbau ‘Barat’ sebagaimana yang di ungkapkan oleh Amelia Fauzia:

Pada tahun 2001, saya dan teman-teman sudah cukup percaya diri untuk menggunakan dan memperkenalkan kata ‘filantropi’, walaupun beberapa ulama dan organisasi zakat berbasis masyarakat menolak istilah tersebut. Sebagian besar dari mereka beralasan bahwa istilah tersebut berasal dari Barat. Kendati demikian, tidak ada alasan yang lebih mendasar yang bisa menghalangi kami untuk menggunakan istilah tersebut. Kemudian kami meluncurkan proyek riset global tentang “Filantropi untuk Keadilan Sosial di Kalangan Masyarakat Islam” yang melibatkan enam negara: Mesir, India, Turki, Indonesia, Tanzania, dan Inggris. Proyek ini juga di dukung oleh beberapa intelektual Muslim nasional dan internasional.<sup>30</sup>

Sejak tahun 2000 sampai 2010, istilah ‘filantropi’ perlahan mulai populer di kalangan akademisi, media, aktivis LSM, dan masyarakat Indonesia. Menurut

---

<sup>28</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 33.

<sup>29</sup> Saefudin Zuhri (ed), *Filantropi Islam untuk Perdamaian dan Keadilan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Maarif Institute, 2018), hlm. 125.

<sup>30</sup> Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. xxx.

Hilman Latief (dalam Wulansari et al., 2018), bahwa hampir dua dasawarsa terdapat beberapa proyek riset tentang filantropi Islam. Pada awal tahun 2000-an, *Ford Foundation* sebagai sebuah lembaga donor internasional mendanai kajian filantropi Islam di Indonesia dan bekerja sama dengan CSRC (*Center for the Study of Religions and Cultures*) UIN Syarif Hidayatullah. Dengan tema “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial,” proyek ini telah menghasilkan beberapa literatur penting tentang perkembangan filantropi Islam di Indonesia, baik mengenai pertumbuhan lembaga-lembaga pengelola zakat, tata kelola wakaf, dampak filantropi untuk mendorong keadilan sosial maupun proyeksi filantropi Islam di masa akan datang. PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) menjadi lembaga riset yang secara serius mengeksplorasi dinamika perkembangan lembaga filantropi di Indonesia dan memfasilitasi berbagai topik riset, seperti filantropi perempuan, gotong royong, filantropi dan lembaga swasta, dan lain-lain. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) melakukan banyak riset tentang filantropi dan kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Riset-riset dari lembaga tersebut di atas, setidaknya telah memberikan dan membuka jalan untuk pengembangan studi filantropi lanjutan di Indonesia.

Filantropi mengalami perkembangan pesat di berbagai negara muslim dalam beberapa dekade terakhir, baik dari segi potensi, konsep pemberdayaan, pemanfaatan, dan berbagai masalah yang melingkupinya. Secara sosiologis di Indonesia dan di negara-negara serumpun kawasan ASEAN, menunjukkan peran filantropi Islam merupakan instrumen penting dalam usaha pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Hal ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi perkembangan lembaga filantropi, termasuk lembaga keuangan syariah dalam skala kecil, mikro dan menengah dengan menyinergikan semua komponen dan organisasi Islam dalam semangat *amal jama'i*. Dengan demikian, pranata sosial dan infrastruktur perekonomian umat, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah, *Baitul Qiradh*, *Baitulmal Wat Tamwil*) serta lembaga pengelola zakat dan wakaf, yakni Badan Amil Zakat Nasional, lembaga-lembaga

amil zakat swadaya masyarakat, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya menjadi bagian penting kekuatan ekonomi yang efektif.<sup>31</sup>

Sejauh ini filantropi telah banyak menjadi studi, kajian, penelitian dan mewarnai partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Mayoritas penelitian tentang filantropi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perkembangan filantropi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti studi yang dilakukan oleh Janine Clark dalam bukunya *Islam, Charity and Activism*, riset tersebut menggunakan teori gerakan sosial, menunjukkan bahwa kegiatan sukarela dan derma di Mesir, Yordania, dan Yaman telah menguntungkan kebanyakan Muslim kelas menengah.<sup>32</sup> Dalam banyak hal kasus ini juga terjadi di Indonesia, dimana organisasi Muhammadiyah dan kebanyakan organisasi filantropi berkembang serta tumbuh di kalangan masyarakat perkotaan sebagai dampak positif dari perkembangan ekonomi. Seperti dalam penelitian Ghifari Yuristiadi, yang meneliti transformasi kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912-1931. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu, aktivitas kedermawanan organisasi Muhammadiyah pada kurun 1920-an hingga 1930-an di Yogyakarta menunjukkan fungsi sosial agama yang kembali berdenyut setelah sekian lama aktualisasinya terbalut oleh feodalisme di dalam struktur Kawedanan Pengulon Kasultanan Yogyakarta. Aktivitas kedermawanan tersebut juga merupakan respons dengan cara-cara yang elegan atas kolonialisme yang berkontribusi membawa gerakan zending dan misi, juga abainya negara kolonial terhadap kesejahteraan masyarakat bumiputra turut mengundang hadirnya gerakan kedermawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini.<sup>33</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya, organisasi ini tampil sebagai sebuah gerakan sosial yang berupaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang

---

<sup>31</sup> Hafidhuddin, *Filantropi dalam Perspektif Islam*. <https://republika.co.id/berita/p5qn6r396/filantropi-dalam-perspektif-islam>, diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 21:30

<sup>32</sup> Janine Clark, *Charity and Activism* (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 131.

<sup>33</sup> Yuristiadi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*, hlm. 191.

dianut jamaah jauh sebelumnya, yakni paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*.<sup>34</sup> Sebagaimana organisasi-organisasi lainnya yang tumbuh di masa penjajahan, gerak roda organisasi selalu terkait dengan arah perjuangan membebaskan negeri dari belenggu penjajahan selama berabad-abad. Perhatian para pendiri Nahdlatul Ulama terhadap persoalan-persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, telah mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang didukung dalam pelbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>35</sup>

Salah satu lembaga yang dibentuk NU adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZISNU) yang memiliki tugas dan fungsi pada sektor penghimpunan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dari warga NU khususnya dan masyarakat umum serta mendayagunakannya dengan mekanisme pendistribusian sesuai dengan aturan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif warga Nahdlatul Ulama untuk memproyeksikan dana-dana yang terhimpun berasal dari zakat, infak dan sedekah. LAZISNU, yang berdiri di Jakarta pada tahun 2004, secara aktif melakukan kampanye, menawarkan gagasan-gagasan baru model pengelolaan dana filantropi di Nahdlatul Ulama serta telah membangun jaringan di berbagai daerah di hampir semua tingkatan di bawah PBNU dan cabang istimewa di luar negeri. Jejaring lainnya yang dibangun adalah sinergitas dengan lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

---

<sup>34</sup> NU bermazhab Sunni yang berazaskan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Dalam bidang teologi, NU mendasarkan kepada Abu al-Hasan al-Ash'ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, bermazhab pada pada salah satu dari Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dalam wilayah tasawuf, NU berkiblat pada tasawuf Abu Hamid al-Gazali dan Junayd al-Baghdadi. Dalam segi tatanan kehidupan sosial dengan masyarakat luas, NU senantiasa mengedepankan dan memupuk sikap adil dan lurus, penuh toleransi, penuh keseimbangan yang berpegang pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Lihat, Pengurus Wilayah NU Jatim, Keputusan Muktamar NU XXVII (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jatim), 1984, 77-78. Lihat juga PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama' dan Kombes NU di Bandar Lampung (Jakarta: PBNU, 1992), hlm. 128.

<sup>35</sup> Hafid Ismail, "Perilaku Donasi dan Potensi Filantropi Warga Nahdlatul Ulama (Survei LAZISNU di 15 Kota dan Kabupaten di Indonesia)", *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 6 No. 1 Januari – Juni 2019, hlm. 1.

LAZISNU merupakan lembaga filantropi Islam yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dan dana halal lainnya untuk berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat lemah (duafa) dengan pendekatan budaya dan bersumbu pada sumber daya lokal dengan sistem pemberdayaan yang berkeadilan. Merupakan lembaga *rebranding* dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal lembaga tersebut, yang berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas.

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). Sampai saat ini, telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karenanya, penerapan standar mutu manajemen menjadi sebuah keharusan agar mampu menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Lima prinsip ini dijelaskan oleh Rois 'Aam PBNU, K.H. Ma'ruf Amin, yakni:

Kelima prinsip yang dikembangkan oleh NU Care-LAZISNU tersebut merupakan prinsip pengelolaan zakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Prinsip modern, akan menjadikan lembaga amil zakat mampu bersaing secara global dengan lembaga-lembaga filantropi internasional. Kemudian, dengan prinsip akun tabel dan transparan, maka LAZISNU akan menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat, karena memang umat harus mengetahui hal ihwal atas pengelolaan zakat yang telah mereka tunaikan. Begitu pula dengan prinsip amanah yang memang menjadi syarat wajib bagi lembaga untuk mengelola dana umat. Dengan prinsip amanah, maka dana umat akan dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip profesional, akan menjadikannya menjadi lembaga yang mengedepankan profesionalitas dan pelayanan yang terbaik karena ditangani oleh amil-amil yang profesional dan dilakukan dengan manajemen yang sesuai dengan syariat Islam, standar manajemen internasional serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU 2016.

Dedi Wahyudi selaku sekretaris LAZISNU Jawa Barat mengungkapkan bahwa di antara lembaga filantropi Islam di Jabar dengan manajemen NU Jabar. PW LAZISNU Jabar terbentuk sejak tahun 2011. Pada saat ini dipimpin oleh Dr. Abdulah Safe'i., M.Ag sebagai pengurus generasi ke dua (2016-2021). Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di antaranya adalah LAZISNU Jabar berbagi (kegiatan tahunan), Penggalangan Dana Rohingya, Donasi Bencana Alam Lombok, Donasi Bencana Alam Palu dan Dongala, Khitanan Massal, Perbaikan rumah duaafa, Santunan anak sekolah, Santunan Anak Yatim, kegiatan Workshop Manajemen Pemberdayaan ZIS, RAKORNAS NU Care LAZISNU (kegiatan tahunan), Kirab Koin NU dan mengadakan MoU dengan beberapa lembaga yaitu dengan Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama Jabar, Kerja sama Zakat Online dengan PT. Telkom, dan kerja sama dengan Bank Muamalat dan BJB Syariah dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Dalam tulisannya, tampaknya Naomi melihat adanya *gap* (jarak) antara diskursus inklusivitas dan praktik filantropi yang inklusif. Menurutnya, secara diskursif, LAZISNU dan LAZISMU (LAZIS Muhammadiyah) tampak cukup terbuka dalam mendefinisikan karakteristik penerima manfaat yang tidak hanya dari satu kelompok atau satu agama saja, tetapi di dalam praktiknya, masih terdapat kendala psikologis dan strategi operasional sehingga program-program yang secara khusus untuk “orang lain” yang bukan satu kelompok atau satu agama, belum banyak bisa direalisasikan. Namun, penelitian ini pun melihat bahwa di tingkat pusat, beberapa program yang secara praktis inklusif juga sudah banyak terlihat.<sup>38</sup>

Kenyataan bahwa gagasan kolektif tersebut sudah dibenarkan oleh individu, tidak menghilangkan kenyataan bahwa individu itu mendapatkan gagasan kolektif ini dari luar, juga tidak menghilangkan kenyataan bahwa gagasan ini terjadi dan berkembang dalam lalu-lintas masyarakat. Karenanya fakta sosial tidak boleh dijadikan sebagai gagasan, tetapi sebagai sesuatu, sebagai fakta.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dedi Mulyadi (Sekretaris LAZISNU Jawa Barat), Bandung 19 Maret 2021.

<sup>38</sup> Zuhri (ed), *Filantropi Islam...*, hlm. 210.



Sesuai perkembangan zaman, LAZISNU Jawa Barat merupakan salah satu lembaga filantropi Islam Indonesia yang telah bertransformasi dari lembaga amil zakat (LAZ) menjadi lembaga sosial kemanusiaan, yang dalam hasil riset Nurdin termasuk cukup sukses dengan menggunakan manajemen modern. Lembaga filantropi tersebut telah meningkatkan kepercayaan dari donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya dilakukan melalui sistem informasi dan teknologi. Transformasi program bukan hanya sebagai lembaga pengumpulan zakat saja tetapi masalah sosial-kemanusiaan pun dijalankannya menjadi program lembaga.

LAZISNU Jawa Barat merupakan bagian dari masyarakat yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya, sehingga merupakan model tersendiri dalam pengelolaan dana masyarakat (zakat, infak, shadaqah, *corporate social responsibility*) dan dana sosial lainnya yang profesional, kompetitif, sehingga saling melengkapi antara kemiskinan dan pengelolaan dana.

Penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat kecenderungan lembaga filantropi apakah mentalitasnya didasarkan pada solidaritas organik atau mekanik, yaitu aktivitas LAZISNU dalam pengentasan kemiskinan itu bukan berdasarkan inisiatif individu tapi inisiatif kesadaran kelompok atau kolektif.

Terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam menempatkan signifikansi studi filantropi Islam di Indonesia, pada umumnya dan LAZISNU pada khususnya, *pertama*, studi-studi yang dilakukan oleh para sejarawan terhadap perkembangan filantropi dalam Islam merefleksikan peran negara dan pemerintah cukup dominan dalam menentukan kebijakan filantropi.<sup>39</sup> *Kedua*, organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, Persis) selalu diasosiasikan sebagai

---

<sup>39</sup> Lihat, bukunya Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Indonesia*. Buku tersebut menyajikan penelusuran historis komprehensif mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Buku ini menunjukkan bahwa sepanjang sejarahnya, praktik-praktik filantropi di Indonesia telah diwarnai oleh kontestasi antara agama dan negara; antara upaya untuk melibatkan negara dalam mengatur kegiatan filantropi.

organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi pemberdayaan di satu sisi, juga tidak jarang disebut sebagai organisasi masyarakat perkotaan atau pedesaan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif filantropi Islam. Penelitian ini dilaksanakan dalam kerangka penulisan disertasi di Program Doktor Studi Agama-Agama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus NU Care-LAZISNU Jawa Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Islam, konsep kemiskinan dan kedermawanan bukanlah hal yang asing. Informasi-informasi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa tema-tema sosial telah menjadi salah satu diskursus yang ekstensif di kalangan Muslim. Di kalangan umat Muslim awal telah terbentuk lembaga-lembaga sosial yang khusus menangani kemiskinan dan kedermawanan. Zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan beberapa kata kunci bagaimana pola kedermawanan dilaksanakan dalam tradisi Islam.

NU Care-LAZISNU menunjukkan kinerja yang menarik dan penting untuk dikaji. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini merumuskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini yakni upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif LAZISNU sebagai salah satu lembaga filantropi Islam. Melalui LAZISNU Jawa Barat ini, penelitian ini berdasarkan *problem statement* bahwa terdapat tiga konsep utama di dalam filantropi Islam yang mengakar kuat di dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu konsep (1) mengenai kewajiban agama, (2) moralitas agama, dan (3) keadilan sosial. Konsep pertama itu menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari filantropi dan agama itu sendiri.

---

<sup>40</sup>Hilman Latif, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, dalam bab III “Gagasan Islam Modernis dan Aktivisme Sosial”

Rumusan masalah ini akan diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana konsep filantropi Islam perspektif NU Care-LAZISNU di Jawa Barat?
2. Bagaimana fokus dan arah pelayanan NU Care-LAZISNU dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat?
3. Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan NU Care-LAZISNU di Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa agama memiliki beragam fungsi terhadap kemiskinan, salah satunya melalui lembaga filantropi Islam yang melihat bahwa masalah kemiskinan tidak pernah tuntas dalam sejarah peradaban manusia. Tujuan ini lebih spesifik diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkaji konsep filantropi Islam perspektif LAZISNU dengan menekankan pada fungsi filantropi Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan.
2. Menelaah fokus dan arah program pengentasan kemiskinan LAZISNU dari perspektif filantropi Islam dengan menekankan pada fungsi agama yang memberikan fungsi moral dalam mendorong sikap kedermawanan untuk memulihkan martabat manusia.
3. Menganalisis implementasi program pelayanan pengentasan kemiskinan LAZISNU sebagai bentuk keikutsertaan LAZISNU dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat dan di Indonesia secara umum. Analisis ini akan menekankan pada fungsi agama mampu membangun sistem pelayanan yang dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengayaan teoritis tentang fungsi agama terhadap kemiskinan dalam perspektif filantropi Islam melalui yaitu

- konsep (1) mengenai kewajiban agama, (2) moralitas agama, dan (3) keadilan sosial.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian studi agama-agama (*religious studies*), terutama dengan pendekatan sosiologi yang dianalisis melalui teori fakta sosial Emile Durkheim, dan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pandangan agama terhadap kemiskinan dan pengentasan kemiskinan.
  3. Penelitian ini sebagai dasar teoritis dan model partisipasi agama dalam menghadapi kemiskinan, sehingga menjadi kontribusi ilmiah bagi pemuka agama, organisasi keagamaan, pemerintah, komunitas pegiat ekonomi, lembaga filantropi, dan masyarakat umum dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang kemiskinan dan dinamika pengentasannya, baik secara umum ditingkat nasional dan global ataupun secara khusus mengarustamakan filantropi yang berbasis agama. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menelusuri tema pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam sekaligus mengemukakan perbedaan dengan penelitian ini. Uraian kajian pustaka ini ingin menyatakan pula bahwa kajian penelitian tentang kemiskinan dan filantropi Islam telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun, penelitian pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam di kalangan Nahdliyyin melalui NU Care-LAZISNU dengan studi kasus Jawa Barat dengan perspektif fungsi agama pada ranah disiplin *religious studies*, sejauh pembacaan penulis, belum pernah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian M. Dawam Rahardjo dalam artikel yang berjudul “Kemiskinan: Sebuah Refleksi” (2005) yang membahas tentang perkembangan kajian kemiskinan di dunia. Artikel ini mempengaruhi penulis dalam merefleksikan kemiskinan dari segi perkembangan ilmu pengetahuan

ekonomi. Menurutnya, kemiskinan secara ilmu pengetahuan ditandai dengan terbitnya buku karya Adam Smith, berjudul “*The Wealth of Nation: An Inquiry into the wealth of nation*” (1776), bahwa awal perhatian pemikiran ekonomi adalah perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Thomas Malthus yang mengikuti Mazhab Klasik dari pikiran Smith tersebut, memperhatikan gejala lain bahwa kemiskinan merupakan dampak dari perkembangan penduduk berbanding dengan perkembangan bahan pangan, sehingga terjadi kesenjangan. Kesenjangan melahirkan kemiskinan. Sesuai dengan paham naturalisme saat itu, kemiskinan bisa berkurang secara alamiah ketika masyarakat mengurangi angka kelahiran.

David Richardo mempunyai pemikiran berbeda, yaitu kemiskinan berkaitan dengan distribusi pendapatan. Teori ini mengarah kepada penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi mengikuti pemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja dan modal uang. Teori mengenai nilai kerja ini mempengaruhi pemikiran Karl Marx yang memperhatikan gejala kemiskinan dan sebab-sebab kemiskinan pada masanya. Bagi Karl Marx, kemiskinan terjadi karena eksploitasi pemilik modal atau kapitalis melalui bermacam-macam moda produksi terhadap kaum pekerja atau ploreter. Bukunya yang berjudul *Das Kapital* memfokuskan perhatiannya pada proses eksploitasi dalam moda kapitalis, bahwa moda produksi kapitalis akan terus berkembang, tapi sejalan dengan itu eksploitasi juga makin mendalam. Kekayaan juga akan tumbuh pada pemilik modal, tetapi bersamaan dengan proses itu juga terjadi pemiskinan dan pengangguran di kalangan kapitalis. Tapi pada akhirnya, akan terjadi proses penurunan tingkat laba. Selain itu, alam akan menyelesaikan sendiri masalah kemiskinan itu melalui revolusi proletar untuk menghapus moda produksi kapitalis dan diganti dengan moda produksi sosialis yang mengharuskan sistem kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif.

Namun Berinsten punya pendapat lain, yaitu kapitalisme sendiri sebenarnya dapat diubah secara demokratis dari dalam dengan

penyesuaian diri, selanjutnya melahirkan ideologi Sosial-Demokrasi. Trotsky punya teori lain yang berbeda dengan teori Stalin, bahwa kapitalisme akan terus berkembang secara global, sehingga revolusi sosialis hanya bisa terjadi secara global juga. Menurut Lenin, kapitalisme terus dapat bertahan, yaitu dengan berkembangnya imperialisme; kapitalisme Amerika atau Eropa Barat akan terus berkembang sampai ke tingkat global yang berbentuk kolonialisme baru atau kolonialisme ekonomi. Inilah yang disebut juga neo-kolonialisme. Sedangkan teori dependensia melukiskan hubungan dominasi-ketergantungan yang bersifat eksploitasi antara pusat dan pinggiran, sehingga menimbulkan kemiskinan di kawasan pinggiran.

Terjadi pula perkembangan teori ekonomi konvensional, yaitu mengarah kepada fokus ekonomi saja dengan menghilangkan unsur-unsur non-ekonomi. Dari sinilah lahir ilmu ekonomi yang menjauh dari pola ekonomi-politik zaman klasik dan menghasilkan teori ekonomi mikro yang melihat kepada unit-unit ekonomi pada tingkat perusahaan atau pengusaha. Dari sini pula lahir ilmu manajemen yang memusatkan diri pada pengelolaan faktor-faktor produksi pada tingkat perusahaan. Dari sinilah berkembang teori permintaan dan penawaran yang bergerak menuju keseimbangan yang dimanifestasikan dalam gejolak harga, yaitu harga produk atau barang dan jasa dan faktor-faktor produksi.

Namun teori keseimbangan yang disebut juga teori Neo-Klasik, mengalami kegagalan pada tahun 1930-an, dengan timbulnya Depresi Besar yang ditandai dengan turunnya harga-harga produk terutama hasil pertanian yang dampaknya adalah pengangguran yang luas yang menjadi sumber kemiskinan massal di tingkat nasional dan global. Dari krisis atau depresi ekonomi ini, melahirkan teori baru yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes mengenai peranan negara atau pemerintah dalam menggerakkan kembali perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru. Teori ini dengan sukses dilaksanakan di AS yang menghasilkan pemulihan ekonomi. Depresi Besar ekonomi yang diperkirakan akan

mengakhiri sistem kapitalis ini, ternyata dapat dicegah untuk melahirkan revolusi. Dengan teori ekonomi makro ini, kapitalisme telah menyesuaikan diri, dengan menyerap unsur-unsur spesialisasi, khususnya yang menyangkut perimbangan antara peranan pasar dan Negara.<sup>41</sup>

Terbentuknya teori ekonomi mikro dan makro ini telah membentuk teori ekonomi arus utama (*mainstream*). Teori ekonomi arus utama inilah yang dinilai bertanggung-jawab terhadap terciptanya kemakmuran di negara-negara industri maju. Ketika sesudah Perang Dunia Kedua telah lahir puluhan negara-negara yang merdeka dari kolonialisme, timbul gagasan pada dasawarsa 50-an, upaya untuk mengeksport teori ini ke negara-negara yang baru berkembang. Dari sinilah lahir teori pembangunan ekonomi (*economic development*) atau teori ekonomi pembangunan (*development economics*). Hanya saja teori ini terlalu menyederhanakan persoalan, yaitu melihat kemiskinan hanya sebagai gejala ekonomi yang tertulis dalam teori-teori ekonomi yang formal. Padahal kemiskinan adalah sebuah masalah yang sangat kompleks, dan karena itu harus dipandang dari berbagai sudut pengetahuan, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, politik dan budaya.<sup>42</sup>

Myrdal melihat pembangunan sebagai masalah penggunaan sumber daya manusia yang menyangkut kualitas manusia sebagai kunci pemecahan masalah kemiskinan. Di sini, Myrdal harus berbicara juga mengenai masalah pendidikan. Karena kemiskinan adalah sebuah masalah struktural, maka Myrdal berpendapat bahwa pembangunan harus dilakukan dalam jangka panjang, sehingga memerlukan perencanaan yang dilakukan oleh Negara, salah satunya melalui pendidikan pengembangan sumber daya manusia.

Cara berpikir ini muncul dalam pemikiran Hatta, ketika ia membentuk kelompok Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuainya sendiri pada tahun 1947, jauh sebelum lahir pemikiran Myrdal. Hatta juga melihat

---

<sup>41</sup> Rahardjo, *Islam dan Transformasi...*, hlm. 34.

<sup>42</sup> Rahardjo, *Islam dan Transformasi...*, hlm. 34.

pembangunan sebagai masalah kompleks yang harus dipikirkan dan direncanakan dalam jangka panjang. Pembangunan sebagai konsep “perencanaan jangka panjang” ini pula yang sebenarnya didapat oleh Widjojo Nitisastro dan kelompok teknokratnya ketika memulai membangun ekonomi pada masa Orde Baru. Hanya saja, Widjojo dan kawan-kawannya ketika itu pada awalnya masih terjebak pada pola pemikiran tentang pembangunan sebagai masalah ekonomi semata-mata sehingga merumuskan tujuan pembangunan sebagai masalah peningkatan pendapatan nasional dan per kapita. Sebenarnya tingkat pendapatan masyarakat per kapita itu memang merupakan indikator kemiskinan. Jadi kemiskinan memang terhapus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat adalah titik tolak atau modal bagi perkembangan ekonomi selanjutnya, melalui investasi.<sup>43</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Nasikun dalam artikel berjudul “*Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*” pada tahun 2001. Penelitian ini menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: (a) *Policy induces processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan dan direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan; (b) *Socio-economic dualism*: negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor; (c) *Population growth*: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung; (d) *Recources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan; (e) *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam; (f) *The marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki; (g) *Cultural and ethnic factors*: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara

---

<sup>43</sup> Rahardjo, *Islam dan Transformasi...*, hlm. 38.



kemiskinan; (h) *Exploitative intermediation*: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat); (i) *Internal political fragmentation and civil strife*: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan; (j) *International processes*: bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.<sup>44</sup>

3. Penelitian Jaco Beyers dalam artikel yang berjudul “*The effect of religion on poverty*” (2014). Yang meneliti fungsi agama terhadap kemiskinan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat tiga fungsi agama terhadap kemiskinan. Penelitian Beyers berasal dari berbagai hasil penelitian tentang agama dan kemiskinan dan berbagai teori dari para peneliti, sebagaimana terlihat jelas dalam berbagai kutipan yang digunakannya. Beyers mengemukakan bahwa respons terhadap kemiskinan selalu bersifat kontekstual. Setiap masyarakat merespons kemiskinan dengan cara yang berbeda, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi, politik, budaya, psikologis, filosofis dan tradisional serta keyakinan agama.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, agama berperan dalam mengatasi kemiskinan, menjadi kesadaran moral masyarakat tentang kemurahan hati, sehingga mempengaruhi nilai-nilai masyarakat, serta meningkatkan harga diri dan martabat manusia di tengah deraan materialisme dan konsumerisme. Terhadap fenomena kemiskinan, agama mampu menghubungkan bentangan dari kehidupan dunia dengan dunia spiritual. Kekayaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi. Kebebasan untuk hidup tanpa beban adalah aset. Agama dapat berkontribusi untuk mengalami kepenuhan hidup dalam segala bentuknya. Penelitian Beyers yang bermuara pada konklusi tiga fungsi agama terhadap kemiskinan

---

<sup>44</sup> Nasikun, “Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan”, diktat kuliah (Yogyakarta: UGM, 2001), hlm. 21.

<sup>45</sup> Jaco Beyers, “The effect of religion on poverty”, *HTS Teologiese Studies*, Vol. 70, No. 1, 2014, hlm. 4.

merupakan sebuah pernyataan yang sangat menarik, namun perlu dikaji dalam realitas sosial.

4. Penelitian lainnya mencoba menghubungkan pengaruh kemiskinan dengan sikap keberagamaan yang dilakukan oleh William J. Hoverda et.al berjudul *Does poverty predict religion?* (2013). Studi Hoverda mengemukakan bahwa negara-negara yang memiliki PDB yang lebih rendah cenderung lebih religius (Crabtree, 2010). Lalu, apakah agama bisa menjadi penyebab atau akibat dari rendahnya kinerja ekonomi, atau apakah terdapat factor lain yang secara independen menyebabkan kemiskinan? Dengan menggunakan revisi teori deprivasi dari Stark (1972), bahwa deprivasi ekonomi merupakan penentu utama bagi kekuatan religiusitas anggota kelompok agama.<sup>46</sup>

Kepercayaan agama bukanlah fungsi sederhana dari kelas sosial; sebaliknya, deprivasi mempengaruhi identifikasi keagamaan di antara mereka yang sudah menjadi anggota kelompok agama. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepemilikan kelompok agama (afiliasi keagamaan) dan kekuatan komitmen keagamaan (identifikasi agama). Deprivasi mempengaruhi yang terakhir, sebab menurut Stark (1972), ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pengalaman kemiskinan merupakan prediktor kuat menuju afiliasi keagamaan; melainkan, ada banyak alasan mengapa seseorang dapat bergabung atau meninggalkan kelompok agama (Stark & Finke, 2000). Bergabung ataupun meninggalkan kelompok agama adalah fungsi variabel yang kompleks, termasuk ketersediaan alternatif keagamaan dan kekuatan persaingan agama.

5. Penelitian Amelia Fauzia dalam bukunya yang berjudul "*Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*"<sup>47</sup> buku

---

<sup>46</sup> Stark, R. "The Economics of Piety: Religious Commitment and Social Class". In G.W. Thielbar & S.D. Feldman (Eds.), *Issues in social inequality* (pp), (Boston, MA: Little Brown, 1972), hlm. 483-503.

<sup>47</sup> Amelia Fauzia, *Faith and the State, A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Leiden and Boston: E.J. Brill, 2013). Dalam bahasa Indonesianya menjadi *Filantropi Islam*:

tersebut menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan historis dan analisis sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat filantropi bukan sebagai fenomena sosial yang statis tapi filantropi mengalami berbagai perubahan yang diakibatkan oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini mengikuti pendekatan “perubahan dan berkelanjutan”.<sup>48</sup> Dalam kesimpulannya, Fauzia menemukan bahwa masyarakat sipil telah ditopang oleh praktik filantropi. Ketika negara kuat, wacana praktik dan filantropi Islam tetap bertahan sebagai tradisi pada akar rumput, sementara ketika negara lemah, wacana dan praktik tersebut menjadi kuat di hadapan negara. Keseimbangan antara keyakinan agama dan negara dipelihara dengan cara seperti itu. Sementara itu, umat Islam Indonesia tidak bisa dipisahkan dari gerakan kebangkitan Islam global yang telah menebalkan identitas Islam. Atas alasan itu, ketegangan antara negara dan organisasi filantropi Islam tidak akan menurun, dan tampaknya akan terus bertahan karena filantropi Islam, terutama zakat, menjadi bagian yang semakin penting dari identitas Muslim Indonesia.<sup>49</sup>

6. Hilman Latief, dalam bukunya “*Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*” melalui bukunya penulis hendak mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh bagaimana sesungguhnya dinamika pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Muhammadiyah, serta kegiatan pelayanan-pelayanan untuk kemudian mencoba membingkainya dalam konteks wacana dan praktik gerakan kesejahteraan di Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan di satu sisi, dan organisasi sosial di sisi yang lain, maka yang coba penulis telaah lebih jauh terkait dengan kultur, struktur, dan dilema-dilema yang dihadapi dalam pengorganisasian, penggalangan dan pengadministrasian dana umat oleh Muhammadiyah. Terdapat beberapa alasan terkait hal itu diantaranya:

---

*Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

<sup>48</sup> Fauzia, *Filantropi Islam...*, hlm. 23.

<sup>49</sup> Fauzia, *Filantropi Islam...*, hlm. 280.

Tradisi memberi adalah sebuah watak yang sesungguhnya sudah menyatu dalam masyarakat, apa pun budayanya dan dimana pun peradabannya. Budaya gotong royong di Indonesia adalah salah satu bentuk kerja sama sosial dalam suatu komunitas dimana individu-individu yang berada dalam komunitas itu mendedikasikan waktu, tenaga, dan harta untuk mencapai tujuan bersama. Mengangkat isu tentang struktur karena dalam kajian tentang filantropi, kultur kebaikan dalam masyarakat sudah terlembagakan. Dewasa ini orang tidak hanya terlibat atau melibatkan diri dalam sebuah kegiatan sosial yang sifatnya individual—meskipun masih ada yang seperti itu—, melainkan kegiatan kolektif. Sebagian masyarakat sudah mulai menyadari bahwa perlunya membangun tradisi filantropi yang kuat melalui organisasi. Meskipun struktur dan kultur dalam gerakan filantropi Islam di Muhammadiyah menjadi aspek yang menjadi perhatian utama dalam bukunya, maka penulis merasa perlu untuk mengeksplorasi dinamika yang terjadi di lapangan, dengan mendiskusikan problematika dan dilema-dilema, baik yang bersifat kultural maupun struktural, yang dihadapi oleh organisasi ini.<sup>50</sup>

7. Hilman Latief, dalam bukunya *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*. Terdapat tiga entitas yang menjadi pembahasan dalam buku ini, yaitu aktor-aktor yang mewakili pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis. Tiga entitas tersebut saat ini menjadi penting dalam pengembangan wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia. Tidak seperti karya-karya lainnya, buku ini secara spesifik mengangkat masalah tata kelola filantropi Islam dan kaitannya dengan perkembangan serta inovasi konsep-konsep filantropi yang dipraktikkan masyarakat Indonesia. Terdapat tiga aspek tentang filantropi Islam. *Pertama*, aspek normatif-filosofis. Secara normatif, tradisi ini merupakan salah satu dari lima pilar Islam, yaitu melalui konsep zakat. *Kedua* aspek historis. Sejarawan Adam Sabra menyatakan bahwa konsep sedekah dalam

---

<sup>50</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. xxv-xxx.

bentuk *private charity* boleh jadi merupakan bentuk yang juga berkembang jauh sebelum Islam, misalnya dalam tradisi Yahudi, Kristen maupun Cina. *Ketiga* aspek sosial budaya, bahwa aktivisme filantropi merupakan manifestasi dari kesadaran manusia secara kolektif dalam membangun kesejahteraan, adalah asumsi umum yang tidak terbantahkan. *Keempat* aspek politik. Konsep negara bangsa (*nation state*) modern memiliki implikasi luas dalam membentuk regulasi aktivisme filantropi.

8. Penelitian Ghifari Yuristiadhi, dalam bukunya “*Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta, 1912-1931*” studi ini merupakan kajian sejarah sosial yang menggunakan pendekatan sosial-ekonomi dan metode penelitian sejarah. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa transformasi kedermawanan Islam di Yogyakarta pada tahun 1912-1931 di stimulus oleh empat momentum. Pertama, dampak panjang ekspansi perkebunan milik swasta Eropa di Yogyakarta. Kedua, diberlakukannya reorganisasi tanah di wilayah kesultanan Yogyakarta. Kebijakan ini telah menggeser status penguasaan tanah dari sultan kepada masyarakat. Ketiga, munculnya ‘santri urban’ sebagai kelas menengah baru di perkotaan Yogyakarta yang memiliki kesadaran keagamaan baru sekaligus kekuatan ekonomi, khususnya *non-farm*. Mereka yang kemudian mengisi organisasi-organisasi Islam dan menciptakan gerakan-gerakan sosial baru, termasuk kedermawanan. *Keempat*, dinamis dan terbukanya Kawedanaan Pengulon Kasultanan Yogyakarta. Pergantian Kiai Penghulu ketika itu menjadi Kawedanaan Pergulon lebih terbuka dalam merespon hadirnya organisasi-organisasi Islam pada kurun tersebut, sehingga mereka berkesempatan turut memiliki ruang dalam pengelolaan kedermawanan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Kawedanaan Pengulon.<sup>51</sup>
9. Penelitian Hilman Latief. “*Philanthropy and “Muslim citizenship” in post-Suharto Indonesia*”, *Journal Southeast Asian Studies Kyoto University* Volume 5 Issue (2016), 269-286. Penelitian ini mengemukakan bahwa

---

<sup>51</sup> Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*, hlm. 187.

kemunculan asosiasi filantropi Muslim menandakan aktivisme sosial dan politik Islam yang semakin terlihat, di Indonesia seperti di tempat lain di dunia Muslim. Bertindak sebagai penyedia kesejahteraan non-negara, asosiasi ini menyediakan “jaminan sosial” bagi kelompok miskin dan yang kurang beruntung. Penelitian ini mengemukakan masalah dengan pertanyaan sejauh mana masalah kesejahteraan dirasakan oleh organisasi-organisasi filantropi Muslim sebagai membentuk debat baru tentang "kewarganegaraan"? Bisakah konsep Islam tentang *ummah* didamaikan dengan gagasan kewarganegaraan modern? Riset ini sangat membantu memahami filantropi Islam di Indonesia dalam proses penelitian disertai.

10. Penelitian Hilman Latief menerbitkan artikel “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* Volume 28 Issue 1 (2013), 123-139. Riset ini mengemukakan tentang kemungkinan kontribusi filantropi Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, sebab terdapat tradisi wakaf dan sedekah untuk lembaga pendidikan dalam konteks Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pendirian Lembaga Pengembangan Insan oleh LAZISMU, Sekolah Juara dan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran melalui program Beasiswa Studi Santri Quran (BASIQ), Ekonomi Pesantren Produktif (EKSPOR) dan Daqu School (Darul Qur'an School) oleh Rumah Zakat Indonesia. Riset ini melihat bahwa lembaga filantropi Islam di Indonesia belum mempengaruhi pendidikan di perguruan tinggi Islam sebagai mitra kerja yang utama dalam mendorong riset-riset mutakhir pengembangan studi Islam. Sedangkan pengembangan studi-studi Islam di dunia Barat ternyata telah disponsori oleh para filantropis Muslim terkenal, seperti keluarga Bin Laden, keluarga Abbasi, dan keluarga kerajaan Saudi.
11. Penelitian dari *Social Trust Fund* (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Penelitian ini adalah pemetaan awal mengenai perkembangan terkini praktik filantropi masyarakat Muslim untuk melihat perkembangan praktik filantropi yang berkeadilan sosial di Indonesia, apa saja faktor pendorongnya, peluang serta tantangannya. Filantropi berkeadilan sosial

dengan target menghilangkan akar permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, mengandalkan program pemberdayaan jangka panjang, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang bersifat non-diskriminatif dan bersifat inklusif, serta menerapkan manajemen dan akuntabel yang transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, interdisipliner, dan mengambil data di delapan provinsi selama enam bulan, penelitian ini fokus melihat organisasi sebagai katalisator.

Tim peneliti menemukan bahwa kendati dalam tingkat yang beragam, terserak, dan tidak menjadi arus utama, praktik-praktik filantropi berkeadilan sosial sudah dijalankan, baik di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi. Organisasi secara kreatif berhasil menjawab tantangan regulasi, fikih menyatakan bahwa terjadi sebaran ide dan praktik, baik ditingkat individu maupun kelembagaan, yang sudah mengarah pada praktik filantropi yang berkeadilan sosial, walau belum menjadi *mainstream*. Masih perlu untuk mendukung penguatan menghilangkan akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, dengan program pemberdayaan-berkelanjutan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang inklusif, dan memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, tapi juga bergerak pada isu-isu penting kekinian, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi.<sup>52</sup>

12. Penelitian ini menggunakan pula hasil riset program *Maarif Fellowship* (MAF) 2017-2018, mengemukakan bahwa masalah keadilan sosial yang dibangun oleh filantropi Islam memiliki potensi solutif dalam upaya meredakan masalah kekerasan dan ekstremisme yang menjadi bagian dalam kehidupan sosial di Indonesia. Gerakan filantropi berbasis keagamaan atau berbasis ormas keagamaan memiliki peluang untuk melakukan moderasi dan “*disengagement*” laku ekstremisme-terorisme. Riset ini menyatakan beberapa aspek penting, bahwa; *pertama*, Filantropi pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di kalangan umat. Lebih

---

<sup>52</sup> Zuhri (ed), *Filantropi Islam...*, hlm. 270.

dari itu filantropi juga seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi terutama ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme dengan memberikan penyelesaian terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi keluarga eksnapiter. Filantropi juga bisa diorientasikan untuk memperkuat program-program pencegahan radikalisme-terorisme dengan memperkuat pandangan keagamaan moderat (*Islam wasathiyyah*).

Gerakan filantropi Islam dengan mengumpulkan sumber finansial dari umat Islam harus bisa digunakan untuk menciptakan solusi fundamental bagi kehidupan umat itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga dan kelompok eks-narapidana terorisme dan orang-orang yang potensial melakukan tindakan ekstremisme-terorisme harus menjadi bagian penting dari gerakan filantropi berbasis keagamaan ini. Ketiga, sebagaimana diungkap dalam beberapa hasil riset, kedermawanan dan filantropi yang diorientasikan pada isu radikalisme-ekstremisme-terorisme saat ini banyak ditemukan untuk memperkuat proses radikalisasi dan menopang gerakan ekstremisme dan terorisme itu sendiri.<sup>53</sup>

Dari uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, baik dalam tema penelitian, landasan teoritis, ataupun dari segi lokasi penelitian, maka sejauh kajian penulis terkait dengan penelitian terdahulu mengenai pengentasan kemiskinan dengan tema agama dan kemiskinan pada lembaga filantropi Islam NU Care-LAZISNU belum ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengurai lebih dalam tentang pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam pada bab-bab dan tahapan penulisan penelitian.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersipat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian;

---

<sup>53</sup> Zuhri (ed), *Filantropi Islam...*, hlm. 270.



penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut.<sup>54</sup>

### 1. *Grand Theory*: Fakta Sosial

Dalam penelitian disertasi ini yang penulis gunakan dalam *grand theory* yaitu menggunakan teori Fakta Sosial Emile Durkheim.<sup>55</sup> Durkheim dalam memandang agama didasarkan atas ilmu sosiologi. Dalam bukunya *The Rule of Sociological Method* (1895), Durkheim menjelaskan bagaimana sosiologi seharusnya diterapkan seobjektif mungkin dan dijadikan ilmu yang benar-benar independen.<sup>56</sup> Bagi sosiolog, fakta sosial eksis dalam hubungannya dengan sistem sosial yang menjadi bagian dari fakta tersebut, dan karenanya fakta-fakta sosial tersebut tidak akan bisa dipahami terlepas dari sistem sosial.<sup>57</sup>

Salah satu kajian agama melalui tinjauan sosiologi dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan memahami faktor-faktor yang membentuk ikatan solidaritas dimasyarakat dengan melihat wujud praktik keagamaan (tindakan, perilaku) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Durkheim melihat agama sebagai suatu fenomena sosial.<sup>58</sup>

Kajian ini diperlukan sebab elemen-elemen di dalam pengentasan kemiskinan melalui LAZISNU bisa dijelaskan dengan melalui pendekatan sosiologi yang berkenaan dengan teologi dalam menyikapi persoalan kemiskinan. Dhavamony mengartikan bahwa dalam memahami ajaran agama manusia dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu sosiologi, dengan menggunakan (bantuan) teori-

---

<sup>54</sup> Juhaya.S. Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 129.

<sup>55</sup> Durkheim dilahirkan di Epinal bagian timur Perancis pada tahun 1858. Durkheim bukan saja mengadakan penelitian tentang berbagai aspek dari kehidupan sosial, melainkan juga dan lebih penting ikut serta meletakkan dasar dari ilmu Sosiologi. Bersama Karl Marx dan Webber, ia dianggap sebagai tokoh utama dari cabang utama ilmu sosial. Dari sudut perkembangan teori ia dianggap sebagai salah seorang pelopor dari pendekatan fungsionalis, yang teorinya hendak menerangkan gejala sosial berdasarkan kaitannya dengan keseluruhan organisme sosial. Lihat, Taufik Abdullah, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas* (Jakarta: YOI, 1986), hlm. 1.

<sup>56</sup> Pals, *Seven Theories of Religion...*, hlm. 137.

<sup>57</sup> Durkheim, *The Elementary From...*, hlm. 145.

<sup>58</sup> Anthoni Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 130.

teori di dalamnya. Cara analisis ini dipersempit menjadi hanya mengamati peran agama dengan tekanan pada kebiasaan, peribadatan dan kepercayaan dalam hubungan-hubungan sosial.<sup>59</sup>

Teori yang digunakan dalam menganalisis kaitan antara pengentasan kemiskinan dalam perspektif LAZISNU yaitu menggunakan fakta sosial Emile Durkheim. Menurut Durkheim fakta sosial terdiri dari dua macam, *pertama*, dalam bentuk material. Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*) contohnya birokrasi dan hukum. *Kedua*, dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, contohnya budaya, institusi sosial.<sup>60</sup>

Durkheim menegaskan bahwa fungsi suatu unsur dari sebuah kehidupan sosial berkorespondensi dengan makna umum yang ia kandung dalam kaitannya dengan organisme sosial secara keseluruhannya, dan hal tersebut harus dipisahkan secara tegas dari tujuan, kepentingan, maupun maksud para individunya.

Dengan demikian manakala seseorang menjelaskan sebuah fenomena sosial, maka sebab musabab yang secara efisien menghasilkannya dan fungsi yang ia penuhi seharusnya diselidiki secara terpisah. Kita lebih suka menggunakan kata 'fungsi' dari pada 'tujuan' atau 'sasaran' justru karena fenomena sosial pada umumnya tidak mengada demi manfaat dari sesuatu yang dihasilkannya. Kita seharusnya menentukan apakah terdapat sebuah korespondensi antara fakta yang diamati dengan berbagai kebutuhan yang berlaku umum bagi organisasi sosial, dan di dalam hal apa korespondensi itu terjadi, tanpa berusaha mesti mengetahui apakah hal itu bersifat intensional atau tidak.<sup>61</sup>

Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari dan menyelidiki apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial. Durkheim mendefinisikan Fakta sosial yaitu setiap cara bertindak baik yang diatur atau

---

<sup>59</sup> Mariasushai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, diterjemahkan oleh Kelompok Studi Agama Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 22.

<sup>60</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpengetahuan Ganda* (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 14-15.

<sup>61</sup> Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (London Basingstoke: The Macmillan Press, 1982), hlm. 123.

tidak, cenderung melakukan paksaan ekstern terhadap individu. Setiap cara bertindak yang bersifat umum dalam masyarakat tertentu dan di dalamnya memiliki eksistensinya sendiri, bebas dari perwujudan individual masyarakat itu sendiri.<sup>62</sup>

Here, then, is a category of facts which present very special characteristics: they consist of manners of acting, thinking and feeling external to the individual, which are invested with a coercive power by virtue of which they exercise control over him. Consequently, since they consist of representations and actions, they cannot be confused with organic phenomena, nor with psychical phenomena, which have no existence save in and through the individual consciousness. Thus they constitute a new species and to them must be exclusively assigned the term social. It is appropriate, since it is clear that, not having the individual as their substratum, they can have none other than society, either political society in its entirety or one of the partial groups that it includes - religious denominations, political and literary schools, occupational corporations, etc. Moreover, it is for such as these alone that the term is fitting, for the word 'social' has the sole meaning of designating those phenomena which fall into none of the categories of facts already constituted and labelled.<sup>63</sup>

Durkheim membedakan dua tipe fakta sosial, yakni material dan non material. Meskipun Durkheim membahas keduanya dalam karyanya, namun perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial nonmaterial (misalnya, kultur, institusi sosial) ketimbang pada fakta sosial material (birokrasi, hukum).<sup>64</sup>

Dalam fakta sosial nonmaterial Durkheim membahas masyarakat primitif dalam menemukan akar agama. Durkheim yakin bahwa ia akan dapat secara lebih baik menemukan akar agama itu dengan jalan membandingkan masyarakat primitif yang sederhana ketimbang di dalam masyarakat modern yang kompleks. Temuannya bahwa sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan lainnya bersifat profan. Dalam agama primitif (totemisme)<sup>65</sup>, ini benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan,

<sup>62</sup> Baal, *Sejarah dan Pertumbuhan....*, hlm. 203.

<sup>63</sup> Emile Durkheim, *The Rules of Sociological...*, hlm. 52.

<sup>64</sup> Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi Modern....*, hlm. 22.

<sup>65</sup> Kata 'totem' baru muncul dalam etnografi menjelang akhir abad ke-18. Pertama kali kata ini muncul dalam buku penafsir Indian, J. Long yang berjudul *Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trades* yang diterbitkan tahun 1791. Menurut Durkheim, Totemisme merupakan suatu bentuk agama, meskipun kenyataannya totemisme tidak mempunyai roh-roh atau dewa-

dan binatang di dewakan. Selanjutnya totemisme dilihat sebagai tipe khusus fakta sosial nonmaterial, sebagai bentuk dari kesadaran kolektif. Kemudian Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama adalah satu dan sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam fakta sosial nonmaterial.<sup>66</sup>

Durkheim percaya bahwa kehadiran religi dalam masyarakat tidak dapat dielakkan.<sup>67</sup> Ia merupakan spekulasi metafisik tentang susunan dan sifat-sifat alami, namun dipadukan dengan bentuk-bentuk tingkah laku ritual dan disiplin moral. Karakter ini merupakan sumber sikap altruistis yang mempunyai dampak mengendalikan egoisme, mendorong manusia untuk berkorban tanpa pamrih, dengan demikian pula ia mengikatkan diri dengan sesuatu yang berada di luar dirinya yang penuh melambangkan cita-cita. Mengenai sumbangan agama kepada pemeluknya, Durkheim menyatakan “in reality, then there are no religions which false. All are true in there own fashion; all answer, though in different ways, to give condition of human existence”.<sup>68</sup>

Dalam studinya, Durkheim berusaha memasukkan keanekaragaman agama ke dalam bentuk kesatuan agama. Kajian klasik sosiologi yang bersifat pengantar dan sekaligus memuat beberapa kesimpulan ini dimaksudkan untuk membantah definisi-definisi tentang agama yang telah ada sebelumnya.<sup>69</sup> Durkheim

---

dewa yang dipribadikan. Totemisme merupakan jenis paling primitif dari agama-agama yang kita ketahui sekarang ini, bahkan sangat mungkin merupakan bentuk yang paling primitif dari yang pernah ada. Lihat Durkheim, *The Elementary From...*, hlm. 195.

<sup>66</sup> Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi Modern...*, hlm. 23.

<sup>67</sup> Menzies, *Sejarah Agama Agama...*, hlm. 65.

<sup>68</sup> Durkheim, *The Elementary From...*, hlm. 56.

<sup>69</sup> Tylor, Frazer dan Freud yang disibukan dengan ide konvensional bahwa agama adalah kepercayaan kepada kekuatan supranatural, seperti Tuhan datau dewa-dewi, namun Durkheim tidak sependapat dengan mereka. Dari awal Durkheim sudah mengklaim bahwa masyarakat primitif sebenarnya tidak berpikir tentang dua dunia yang berbeda, natural dan superanatural, seperti yang dipikirkan oleh masyarakat beragama dalam kebudayaan yang lebih maju dari mereka. Masyarakat modern sangat terpengaruh dengan asumsi dan hukum-hukum alam yang diberikan oleh sains, sedangkan masyarakat primif tidak. Lihat Pals, *Seven Theories of Religion*, 44. Begitu pula tahapan-tahapan perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Tahapan yang disampaikan Peursen: *pertama*, Tahap mitis, bilamana manusia masih terbenam di tengah-tengah dunia sekitarnya; *kedua*, Tahap ontologis, bilamana manusia mengambil jarak dengan alam raya dan terhadap dirinya sendiri; *ketiga*, Tahap fungsional, bila manusia mulai menyadari relasi-relasi lalu mendekati tema-tema tradisionil (alam, Tuhan, sesama, identitas sendiri) dengan cara yang baru. Lihat: C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* diterjemahkan oleh Dick Hartoko, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 233.

mengatakan bahwa agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkannya dalam menyatukan komunitas masyarakat di bawah satu kesatuan ritual dan kepercayaan umum.<sup>70</sup> Lebih lanjut Durkheim mengklaim bahwa agama adalah “sesuatu yang amat bersifat moral”. Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat sakral atau profan. Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen “supernatural”, melainkan terletak pada konsep tentang “yang sakral” (*sacred*), dimana keduanya yaitu supernatural. Kepercayaan adalah pikiran dan ritual adalah tindakan.<sup>71</sup>

Dengan pemikirannya tentang fakta sosial, Durkheim begitu menekankan keberadaan masyarakat sebagai suatu entitas yang mengatasi kesadaran subjektif manusia. Pada kutub pemikiran yang lain, Weber mencoba untuk menganalisis dan memahami motivasi subjektif untuk memperoleh pemahaman lebih utuh tentang masyarakat. Berbeda dengan Durkheim yang menekankan tentang fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa individu dalam pembentukan kenyataan sosial, Weber justru mengembangkan pemikirannya tentang *verstehen* (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk membedah dan mengetahui berbagai motif dan tindakan sosial manusia dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu ingin melihat bagaimana kesadaran lembaga LAZISNU melakukan tindakan dalam pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada fakta sosial yang berbentuk material dalam hal ini berupa aturan hukum, birokrasi LAZISNU atau tindakannya berdasarkan fakta sosial yang berbentuk nonmaterial yang berangkat dari kesadaran manusia, budaya atau institusi sosial.

Penjelasan sederhana tentang fakta sosial di LAZISNU dapat di uraikan sebagai berikut, santri dari sejak awal masuk pesantren dipaksa untuk ibadah, mengaji, dan tidur pada waktu tertentu. Kemudian sesekali waktu santri tersebut dipaksa untuk mengenal kebersihan, ketenangan dan kepatuhan. Kemudian

---

<sup>70</sup> Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial...*, hlm. 33.

<sup>71</sup> Durkheim, *The Elementary Forms...*, hlm. 66.

<sup>72</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I* (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm. 216.

dipaksa lagi untuk belajar menghormati guru dan sesamanya, menghormati aturan dan kebiasaan, disiplin dan sebagainya. Jika dikemudian hari pemaksaan ini tidak efektif lagi, dikarenakan pemaksaan itu telah membuat santri menjadi semakin terbiasa kemudian timbul dorongan batin bahwa pemaksaan tidak berguna lagi. Namun sebetulnya pemaksaan tersebut tidak berhenti sama sekali karena masih tetap merupakan sumber dari kebiasaan itu sendiri.

Berdasarkan fakta di atas, Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas, kemudian ia membagi menjadi tipe solidaritas yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Term ‘mekanis’ tidak diartikan secara individualistis atau atomistis. Sebaliknya kesadaran diri sebagai individu di zaman purba masih lemah, sedangkan kesadaran kolektif memerintah atas bagian terbesar kehidupan orang. Kesatuan sosial disebut mekanis, sebab anggotanya secara spontan cenderung kepada suatu pola hidup bersama yang sama.<sup>73</sup> Solidaritas mekanik kaitannya dengan LAZISNU merupakan yang didasarkan atas tipe persamaan dan dapat dijumpai pada masyarakat tradisional dimana belum terdapat pembagian kerja. Lambat laun pembagian kerja dalam LAZISNU tersebut berproses, sehingga saat ini dinamakan diferensiasi sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik dimana sudah muncul pembagian kerja yang terdapat di beberapa lembaga filantropi modern.

Pada masyarakat solidaritas organik masing-masing anggota tidak lagi memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain dengan kata lain solidaritas organik adalah sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung seperti suatu organisme biologi.<sup>74</sup> Dalam masyarakat modern kebebasan individu dan toleransi terhadap keyakinan individual dan caranya masing-masing anggota mengatur hidupnya sendiri. Bidang-bidang kehidupan yang dikuasai oleh kesadaran kolektif, makin menyempit. Masyarakat diandaikan tidak berhak untuk mencampuri urusan-urusan pribadi yang makin meluas.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 146.

<sup>74</sup> Kunanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 5.

<sup>75</sup> Veeger, *Realitas Sosial...*, hlm. 147.

## 2. *Middle Range Theory: Struktural Fungsional*

Teori struktural fungsional dalam *middle theory* ini menggunakan Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>76</sup>

Suatu fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu, atau kebutuhan dari sebuah sistem. Parson yakin bahwa terdapat empat fungsi penting yang diperlukan suatu sistem. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *adaption* (A), *goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:<sup>77</sup>

- a. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).

<sup>76</sup> Raho, *Teori Sosiologi Modern...*, hlm. 48.

<sup>77</sup> Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi...*, hlm. 118.

- d. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Kesatuan pada bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Dengan kata lain, bagian-bagian ini membentuk satu kesatuan (sistem) demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu. Dalam mendesain skema AGIL, Parson menggunakannya di semua tingkat dalam sistem teoritisnya, berikut ini adalah contoh bagaimana menerapkan skema AGIL.<sup>78</sup>

- a. Sistem organisme biologis (aspek biologis manusia sebagai suatu sistem) adalah sistem yang tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal sesuai dengan kebutuhan.
- b. Sistem kepribadian, melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
- c. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu.
- d. Sistem kebudayaan, berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu.

Di samping prasyarat fungsional di atas, Parsons juga menilai bahwa keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa persyaratan, yaitu: *pertama*, sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain. *Kedua*, sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain. *Ketiga*, sistem harus mengakomodasi para aktornya secara proporsional. *Keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya. *Kelima*, sistem harus mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Keenam*, bila terjadi

---

<sup>78</sup> Soekanto, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 47.



konflik yang menimbulkan kekacauan maka harus dapat dikendalikan. *Ketujuh*, sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.<sup>79</sup>

### 3. *Applied Theory: Filantropi Islam*

Dalam menggunakan *applied theory* yang penulis gunakan adalah teori filantropi Islam Amelia Fauzia. Menurut Chesney sebagaimana yang dikutip oleh Fauzia, bahwa filantropi dalam Islam dipahami sebagai “kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan”<sup>80</sup> dalam Islam kewajiban moral tersebut dilembagakan ke dalam banyak bentuk, ada yang menurut hukum Islam menjadi hal yang dianjurkan (*sunnah*) dan ada yang diwajibkan. Zakat merupakan salah satu dari tiga bentuk filantropi yang banyak di praktikkan di dunia Islam, selain dua bentuk lainnya, yaitu sedekah dan wakaf.

Bahwa dalam filantropi Islam terdapat konsep (1) mengenai kewajiban agama, (2) konsep moralitas agama, dan (3) keadilan sosial.<sup>81</sup> Pertama konsep kewajiban agama, aspek kewajiban agama dalam filantropi Islam didasari akan kewajiban zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam Al-Qur’an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban salat.

*Kedua*, konsep moralitas agama mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan akan nilai-nilai luhur tersebut.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa

---

<sup>79</sup> Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 67.

<sup>80</sup> Robert McChesney, *Charity Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to do God, essay on Philanthropy No. 14* (Indianapolis: Indiana University Center on Philanthropy, 1995), hlm. 6.

<sup>81</sup> Amelia, *Filantropi Islam*, hlm. 37-39.

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>82</sup>

Dalam ayat tersebut, derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan bentuk kesalehan.

*Ketiga*, konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi Islam sudah terelaborasi dalam Al-Qur'an terutama dalam hal yang mencangkup hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 19 "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". Kemudian surat Al-Israa ayat 26 "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." Lalu distribusi kekayaan antara yang kaya dengan yang miskin dalam surat Al-Hasy ayat 7:

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>83</sup>

Ide mengenai hak-hak untuk orang miskin menjadi alasan serta dorongan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, sedangkan bagi orang kaya agar muncul kesadaran mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Persoalan keadilan dan kemandirian merupakan bagian yang terpisahkan dalam aktivitas filantropi Islam.

Untuk menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

<sup>82</sup> Terjemah al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177

<sup>83</sup> Terjemah al-Qur'an surat Al-Hasy ayat 7

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

